

**FUNGSI SAT INTELKAM DALAM UPAYA DETEKSI DINI
KONFLIK HORIZONTAL ANTAR UMAT BERAGAMA DI
WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

***INTELKAM SAT FUNCTION IN EARLY DETECTION EFFORTS
HORIZONTAL CONFLICT BETWEEN COMMUNITY RELIGION IN
LAND POLRESTABES AREA BANDUNG***

Lisdawati Wahjudin

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

lisda27@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perkembangan lingkungan strategis global, regional berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi kamtibmas yang dinamis di dalam masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Pada hakekatnya kamtibmas merupakan suatu kebutuhan hakiki setiap orang atau masyarakat yang mendambakan suasana aman dan tertib dalam tata kehidupan.

Kata kunci: *Satintelkam, Deteksi dini, Konflik Agama*

ABSTRACT

The development of the global, regional strategic environment influences the security and order of society. The dynamic condition of society in society is one of the prerequisites for the implementation of a national development process in order to achieve national goals characterized by security, order and upholding the law, and the provision of peace fostering and developing the potential and strength of the community in counteracting, preventing and overcoming all forms of violations of law and other forms of interference. In essence kamtibmas is an essential requirement of every person or society who longs for a safe and orderly atmosphere in the order of life.

Keywords: *Satintelkam, Early Detection, Religious Conflict*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam latar belakang kehidupan masyarakatnya yang multi etnik dan multikultural sehingga dapat menjadi penyebab terjadinya konflik

horizontal di beberapa wilayah tak terkecuali di wilayah hukum Polres Bandung. Berdasarkan hasil pengkajian dari Biro Jianstra Sdeops Polri tahun 2007, bahwa penyebab konflik horizontal di masyarakat salah satunya dipicu adanya

keretakan hubungan antar warga karena perbuatan atau sikap kelompok etnis/agama tertentu yang menyinggung harga diri dan rasa keadilan kelompok identitas (etnis/agama) lainnya serta konflik yang terjadi karena penghinaan atas keyakinan beragama.

Untuk mengantisipasi konflik horizontal perlu adanya suatu sistem pencegahan dan pengawasan dalam bentuk deteksi dini dengan cara menggelar jaringan informasi di setiap lapisan masyarakat dan instansi terkait untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan konflik sosial. Fungsi deteksi dini atau yang kemudian juga banyak dikenal dengan nama *early warning system*, sebetulnya sudah dikenal sejak jaman dahulu di masa kerajaan masih berjaya dan digunakan oleh birokrat dalam konteks ketatanegaraan khususnya pertahanan dan keamanan. Terkait dengan konflik alirankeyakinan beragama, pernah terjadi penyerangan oleh kelompok masyarakat setempat terhadap salah satu aliran agama yaitu aliran Ahmadiyah yang dilakukan secara terorganisir oleh ormas keagamaan yang berasal dari Kota Bandung. Maka dari itu diperlukan peran intelijen dalam melakukan deteksi dini, agar tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat.

Mengacu kepada latar belakang rumusan masalah pada tulisan ini adalah "Belum optimalnya peran Sat Intelkam Polres Bandung dalam melakukan deteksi dini guna mencegah konflik horizontal antar umat beragama sehingga harkamtibmas tidak terwujud".

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka penulis menjabarkan ke

dalam persoalan persoalan sebagai berikut:

1. Bagaimana SDM Sat Intelkam Polres Bandung dalam melakukan deteksi dini guna mencegah konflik horizontal di masyarakat?
2. Bagaimana metode yang diterapkan Sat Intelkam Polres Bandung dalam mengatasi permasalahan sosial terkait isu SARA guna mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat ?

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang penekanannya pada suatu proses penggambaran faktafakta yang terungkap di lapangan untuk selanjutnya dilakukan proses analisis guna mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya. Dengan pendekatan Manajemen Strategik, serta dipadukan dengan beberapa konsep terkait serta pengalaman kepemimpinan penulis selama bertugas di satuan kewilayahan.

Beberapa pengertian tentang teori Intelijen, adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari integral dari fungsi intelijen Polri, yang berkewajiban untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri baik dalam bidang pembinaan maupun operasional Kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Pengertian Deteksi dini adalah sebagai suatu usaha atau pekerjaan itu mencari dan menemukan secara awal atau secepatnya terhadap setiap gejala perubahan yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan keamanan¹.

Konflik horizontal, merupakan bentuk konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat. Pada hakikatnya, konflik horizontal adalah konflik sosial antarpihak yang setara². Konflik horizontal dalam penulisan ini adalah konflik antara kelompok aliran agama dengan masyarakat yang tidak setuju terhadap penyebaran aliran agama di wilayahnya.

Pengertian Harkamtibmas, Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat³.

Teori Manajemen Strategik

Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dan pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuantujuan masa datang⁴.

Dari definisi di atas, terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu Bahwa:

1. Manajemen strategik terdiri atas tiga proses:

- a. Pembuatan Strategi
- b. Penerapan Strategi
- c. Evaluasi/kontrol Strategi

2. Manajemen strategik menurut Pearce dan Robinson⁵:

- a. Merumuskan misi organisasi
- b. Mengembangkan profil organisasi pada kondisi intern dan kapabilitasnya
- c. Menilai lingkungan eksternal organisasi (peluang dan kendala)
- d. Menganalisis opsi organisasidisesuaikan dengan sumber dayanya
- e. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki
- f. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum
- g. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek

¹ Republik Indonesia, Kamus Istilah Intelijen, Jakarta; CV. Panca Darma ehati, Hal 26.2004

²Admin, *Pengertian Konflik Horizontal*, dalam <http://matakristal.com/pengertian-konflik-horizontal/>, diunduh tanggal 24 Agustus 2013

³Admin, *Kamtibmas*, dalam <http://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibna>

<s-keamanan-ketertiban-masyarakat.html>, di unduh tanggal 24 Agustus 2013

⁴Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.1996

⁵Pierce, John A dan Richard B Robinson. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

- h. Mengimplementasikan pilihan strategik melalui alokasi sumberdaya yang ada
- i. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang

Teori ini difungsikan sebagai pisau analisis guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi peran Sat Intelkam Polrestabes Bandung terhadap deteksi dini guna mencegah konflik horizontal antar umat beragama dalam rangka terwujudnya harkamtibmas. Di samping itu, manajemen strategik ini digunakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah serta menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai (*goal*).

Teori Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu karakteristik yang mendasar dari seseorang individu, yaitu penyebab yang terkait dengan acuan kriteria tentang kinerja yang efektif. Menurut Trotter dalam Saifuddin (2004) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksikan pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Analisa kompetensi

disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan.

Adapun tipe karakteristik kompetensi menurut Boulter *et.al* (1996), yaitu:

1. Keterampilan (*skill*), kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu.
2. Pengetahuan (*knowledge*), informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu.
3. Konsep diri (*self-concept*), sikap-sikap dan nilai-nilai atau gambaran tentang diri sendiri seseorang.
4. Ciri-iciri (*traits*), karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
5. Motif (*motives*), sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan, yang menyebabkan tindakan seseorang.

Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi (MSDM-BK) disusun dengan pendekatan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) disingkat KSA. Dasar penggunaan pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap merupakan elemen untuk menghasilkan kinerja (*performance*) yang baik⁶.

⁶Admin *Kompetensi*, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28054/3/Chapter%2011.pdf> diakses tanggal 24 Agustus 2013

Teori Peran

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologisosial yang menganggap

sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap **peran social** adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisisosial dan faktor lainnya.

Teater adalah metafora sering digunakan untuk menggambarkan teori peran. Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan "*life-course*" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategorikategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tujuh, pensiun pada usia enam puluh tahun.

Pembahasan

Keberadaan Jamaah Ahmadiyah telah lama tinggal di Indonesia meskipun mengenai tahun tepatnya tidak diketahui. Ahmadiyah adalah satu dari sekian banyak aliran dari Islam. Sebagai sebuah aliran,

tentunya memiliki kebenarannya tersendiri. Namun keberadaannya di Indonesia oleh kalangan Islam garis keras sangat mengganggu. Bahkan ajaranajaran yang dibawa dan disebarluaskan oleh Ahmadiyah adalah sesat. Fatwa sesat yang diyakini kelompok Islam garis keras menyebabkan tindak kekerasan menjadi cara ampuh untuk membubarkan Ahmadiyah. Telah beberapa kali komunitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia diserang, diusir dari lingkungannya hingga yang paling memilukan adalah pembunuhan terhadap jamaah Ahmadiyah. Kejadiankejadian tersebut dipicu bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dengan mengakui bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW.

UndangUndang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik, mengamanatkan dilakukannya upaya penanganan konflik yang lebih komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan mulai dari pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik. Sehingga langkahlangkah Polri dalam menangani konflik seyogyanya mengacu pada ketentuan perundangundangan tersebut. Menurut penulis seharusnya hal seperti demikian dapat dihindari apabila dilakukan sistem deteksi dini dimana bahan keterangan yang diperoleh untuk kemudian diolah dan dijadikan suatu produk intelijen adalah fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan. Tentunya informasi yang sifatnya mentah adalah yang memenuhi syarat dimana terkait dengan keamanan, sumbernya dapat dipercaya dan relevan dengan masalah Kamtibmas yang aktual sehingga kemudian dapat diproses untuk dijadikan saran bagi pengambil kebijakan (dalam kasus ini level Kapolres) untuk mengambil keputusan guna menyusun

rencana kegiatan dan menghitung resiko yang mungkin dihadapi sebagai eksekusi tindakan kepolisian yang diambil. Sampai saat ini upaya Sat Intelkam Polrestabes Bandung melalui pelaksanaan sistem deteksi dini telah dilaksanakan, namun belum optimal dikarenakan adanya kelemahan/kelemahan pada aspek kualitas sumber daya manusia serta metode yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Kualitas Sumber Daya Manusia Sat Intelkam Polres Bandung dalam melakukan deteksi dini guna mencegah konflik saat ini

Deteksi dini merupakan sebuah usaha, kegiatan dan pekerjaan yang

dilakukan oleh Unit/Satuan intelkam untuk menghimpun data dan informasi dalam rangka mengetahui gejala permasalahan dimasyarakat sehingga dapat diketahui secara lebih dini/awal, selanjutnya data diolah menjadi produk intelijen yang disajikan kepada pimpinan dan unsur pengambil keputusan di lingkungan Kepolisian sebagai *early warning* dalam menentukan langkah antisipasi dan penanganannya. Kegiatan Sat Intelkam Polres Bandung dalam upaya deteksi dini untuk mencegah Konflik horizontal selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Kegiatan Sat Intelkam Polres Bandung tahun 2013

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelidikan	20 x	16 x	14 x	12 x	13 x	15 x	13 x	12 x	14 x	12 x	14 x	13 x
2	Pengamanan	10 x	12 x	13 x	13 x	12 x	14 x	12 x	12 x	13 x	12 x	12 x	13 x
3	Penggalangan	14 x	14 x	13 x	15 x	14 x	13 x	14 x	15 x	13 x	14 x	15 x	13 x

Sumber data : Sat Intelkam Polres Bandung tahun 2013

Dari keterangan kasat Intelkam Polres Bandung dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas di Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam deteksi dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sudah didukung dengan anggaran yang cukup serta

sarana dan prasarana yang memadai namun produk intelijen yang di hasilkan belum bisa maksimal karena terkendala dengan sumberdaya manusia di Sat Intelkam Polres tabes Bandung baik secara kuantitas dan kualitas

Tabel 3
Produk intel tahun 2013 Sat Intelkam Polres Bandung

No	Produk	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lap. Info	19 x	20 x	24 x	22 x	23 x	21 x	25 x	23 x	26 x	21 x	24 x	25 x
2	Lap. Info Sus	10 x	15 x	14 x	12 x	16 x	11 x	17 x	14 x	13 x	15 x	13 x	17 x
3	Lap. Atensia	14 x	14 x	13 x	15 x	14 x	13 x	14 x	15 x	13 x	14 x	15 x	13 x

Sumber data : Sat Intelkam Polres Bandung tahun 2013

Kondisi SDM Sat Intelkam Polres Bandung dalam melaksanakan tugas deteksi dini saat ini adalah sebagai berikut :

1. Secara kuantitas, SDM Sat Intelkam Polres Bandung masih terbatas

Secara kuantitas, SDM Sat Intelkam ternyata masih terbatas untuk melakukan deteksi dini potensi konflik. DSPP Sat Intelkam Polrestabes Bandung, berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010, seharusnya berjumlah 65 (enam puluh lima) orang. Data personil sebagai berikut :

Tabel 4

Perbandingan Jumlah DSPP dan Riil Sat Intelkam Polres Bandung

NO.	JABATAN	DSPP		RIIL	
		Jumlah	Pangkat	Jumlah	Pangkat
1.	Kasat Intelkam	1	AKP	1	AKP
2.	Kaur bin ops	1	IP	1	IPTU
3.	Kanit	4	IP	3	IPDA
4.	Anggota	58	BA	47	BRIG
5.	Pns	1	PNS I/II	1	PNS II
JUMLAH		65		53	

Sumber data : Laporan Kesatuan Polres Bandung tahun 2013

Berdasarkan keterangan kasat Intelkam Polres Bandung jumlah anggota saat ini adalah 53 personil, hal ini belum sesuai dengan DSPP karena

masih kekurangan 12 personil yaitu 1 perwira dan 11 bintara.

1. Sedangkan secara kualitas, kompetensi anggota Sat Intelkam Polres Bandung masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil pengamatan, penulis menemukan bahwa kompetensi anggota Sat Intelkam Polres Bandung dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial adalah sebagai berikut:

a. Dari segi pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif dan pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu :

1) Belum semua anggota Sat Intelkam Polres Bandung memiliki pengetahuan dan pemahaman serta referensi tentang masalah konflik sosial seperti: UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/ 527 /VIII /2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang petunjuk arahan penanganan konflik sosial.

2) Anggota Sat Intelkam Polres Bandung belum memiliki pengetahuan dan pemahaman serta referensi tentang tupoksi Sat Intelkam Polres menurut Perkap Nomor 23 Tahun 2010 ttg STOK Polres, Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2011 tentang Manajemen Operasional Kepolisian, Skep Kabik No. 23/VI/2010 tentang Manajemen Opsnal Intelkam Polri, Perkabik No 4 Tahun 2013 tentang Administrasi Produk Intelijen, serta UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

3) Latar belakang pendidikan umum dan kejuruan sebagian besar adalah lulusan SMA dan belum memiliki dikjur Intelijen.

b. Dari segi ketrampilan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk

melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya :

1) Kurangnya ketrampilan anggota Sat Intelkam Polres Bandung dalam menganalisa/menilai potensi konflik yang harus dicegah.

2) Kurangnya ketrampilan anggota Sat Intelkam Polres Bandung dalam membuat laporan intelijen yang berkualitas.

3) Belum semua anggota Sat Intelkam Polres Bandung memiliki ketrampilan dalam melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

c. Dari segi sikap (*attitude*), yaitu :

1) Kurang tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal.

2) Kurangnya motivasi dan kesadaran diri dalam diri sendiri untuk pelaksanaan tugas tugas Intelijen.

3) Masih adanya perilaku yang menyimpang dari anggota Sat Intelkam Polres Bandung.

Metode

Metode yang diterapkan dalam sistem deteksi dini konflik belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut berdampak terhadap perwujudan harkamtibmas. Deteksi dini dapat dikaji berdasarkan siklus operasional intelijen sebagaimana diatur dalam Skep Kabik No. 23/VI/2010 tentang Manajemen Opsnal Intelkam Polri. Siklus intelijen dalam melaksanakan deteksi dini, yakni perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian.

1. Perencanaan

Kondisi rencana deteksi dini faktual pada Satuan Intelkam Polres Bandung, dapat dilihat dari indikator

adanya produk unsur utama keterangan (UUK). Data rekapitulasi yang di dapat dari Sat Intelkam Polres Bandung masih minim, dimana dalam tahun 2013, jumlah pembuatan UUK yang terbanyak ada pada bulan Februari dengan jumlah UUK 6, pada bulan lainnya UUK lebih sedikit.

2. Pengumpulan Bahan Keterangan (baket)

Pengumpulan baket tentang deteksi dini pencegahan konflik sosial, berdasarkan Keterangan Kasat Intelkam Polres Bandung sebagai berikut :

a. Taktik dan teknik yang digunakan lebih banyak menggunakan taktik dan teknik terbuka, yakni baket melalui kepala desa, dan tokoh setempat.

b. Pengumpulan baket mengadakan pulbaket yang dilaporkan oleh Polsek jajaran Polres Bandung.

c. Pengumpulan baket melalui penyelidikan namun belum berdasarkan berdasarkan UUK.

2. Pengolahan baket

Pengolahan baket konflik dilakukan dengan tanpa menghubungkan kejadian lain yang berkaitan, dan faktor yang berpengaruh. Hal ini berakibat pengolahan yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polres Bandung kurang tajam dan tidak komprehensif.

Penyajian baket

Kondisi faktual yang ada bahwa penyajian baket oleh Sat Intelkam Polres Bandung dirasakan lebih sering terlambat, selama tahun 2013 produk yang disajikan kepada pimpinan dalam rangka deteksi dini terhadap konflik SARA, jumlahnya masih minim dalam setiap bulannya.

C. **Implikasi**

Kondisi faktual tersebut di atas menunjukkan bahwa Polres Bandung

belum mengoptimalkan peran Sat Intelkam dalam deteksi dini sehingga berimplikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi SDM Sat Intelkam Polres Bandung baik aspek kuantitas, pengetahuan, kemampuan maupun keahlian yang dikuasai individu dalam mencegah konflik horizontal.

2. Pelaksanaan metode deteksi dini guna mencegah konflik horizontal kurang maksimal dikarenakan pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sebagai wujud deteksi dini, pencegahan dan deteksi aksi tidak mengacu kepada ketentuan yang sesuai.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Teknik analisis SWOT menggunakan 4 (empat) variabel penilaian, yang meliputi (a) faktor faktor internal, yang mencakup: kekuatan dan kelemahan serta (b) faktor faktor eksternal, yang mencakup: peluang dan ancaman, guna menggali aspek aspek kondisi yang terdapat di suatu organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.

A. Internal

1. Kekuatan

a. Tersedianya acuan atau pedoman pelaksanaan tugas Polri dalam mencegah konflik horizontal dikaitkan dengan harkamtibmas.

b. Adanya kekuatan fungsi intelijen yang tergelar sampai dengan tingkat Polsek.

c. Adanya Program Sinergitas Polisional Center (SPC) yang idealnya dilaksanakan sesuai SOP yang ada untuk mengatasi potensi konflik horizontal

d. Adanya semangat dan motivasi setiap individu untuk menjadi *problem solver* dalam penyelesaian konflik horizontal.

2. Kelemahan

a. Kelemahan Intelijen yang tidak mampu mendeteksi adanya ancaman yang akan terjadi, sehingga petugas yang dikerahkan tidak memadai.

b. Tindakan aparat yang ragu-ragu melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh massa, sehingga massa menjadi lebih brutal.

c. Tindakan aparat yang berlebihan atau melakukan kekerasan, sehingga memicukemarahan massa.

d. Tindakan aparat yang memihak salah satu kelompok yang sedang bersengketa.

B. Eksternal

1. Peluang

a. Adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terhadap terciptanya kerukunan antar umat beragama.

b. Peran serta Tomas/Toga/Todat dan Pimpinan Informal secara aktif dalam konflik horizontal yang dilandasi agama.

c. Peran serta masyarakat yang bersedia mendukung dan terlibat dalam pembinaan keamanan bersama-sama dengan Polres Bandung.

2. Kendala

a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri.

b. Kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat yang terbatas.

c. Eforia era reformasi yang membuat masyarakat selalu menggunakan pengerahan kekuatan massa dalam setiap menangani permasalahan.

d. Media massa maupun media sosial yang mudah di akses masyarakat berdampak provokasi terhadap masyarakat.

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem deteksi dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan an penggalangan terhadap potensi konflik horizontal. Untuk menindak lanjuti penanganan konflik sebagai mana Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, Kapolri telah membuat Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/ 527/VIII/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang petunjuk arahan penanganan konflik sosial sebagai pedoman bertindak bagi anggota di lapangan.

A. Kondisi SDM Sat Intelkam Polres Bandung Yang Diharapkan

Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Polres, bahwa Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya di sebut Sat Intelkam adalah unsur pelaksana dengan tugas pokok melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini terhadap adanya potensi gangguan kamtibmas pada tingkat Polres yang berada di bawah kapolres. Dalam melaksanakan tugasnya Sat Intelkam melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kondisi SDM Sat Intelkam Polres Bandung yang ideal adalah sebagai berikut :

1. Secara kuantitas, SDM Sat Intelkam Polres Bandung terpenuhi. Secara kuantitas, SDM Sat Intelkam idealnya adalah sesuai dengan DSPP Sat Intelkam Polres Bandung, berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010, yaitu 65 personil bisa di penuhi.

2. Sedangkan secara kualitas, anggota Sat Intelkam Polres Bandung memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugasnya.

Kompetensi personil Sat Intelkam Polres Bandung apabila di kaji menurut teori Gordon (1988) dalam Sutrisno (2012) menjelaskan beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi. Kompetensi anggota Sat Intelkam Polres Bandung yang ideal dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik horizontal adalah sebagai berikut:

a. Dari segi pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif dan pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu :

1) Anggota Sat Intelkam Polres Bandung memiliki pengetahuan dan pemahaman serta referensi tentang masalah konflik horizontal seperti : UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/527/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang petunjuk arahan penanganan konflik sosial.

2) Anggota Sat Intelkam Polres Bandung memiliki pengetahuan dan pemahaman serta referensi tentang pelaksanaan tupoksinya sebagai intelijen dalam melakukan pencegahan konflik melalui deteksi dini dan peringatan dini, seperti tupoksi Sat Intelkam Polres Bandung menurut Perkap Nomor 23 Tahun 2010 ttg STOK Polres, Peraturan

Kapolri Nomor 9 tahun 2011 tentang Manajemen Operasional Kepolisian, Skep Ka BIK No. 23/VI/2010 tentang Manajemen Opsnal Intelkam Polri, Perkabik No 4 Tahun 2013 tentang Administrasi Produk Intelijen, serta UU No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

3) Latar belakang pendidikan umum dan kejuruan sebagian besar adalah lulusan S1 dan memiliki dikjur Intelijen.

b. Dari segi ketrampilan (*skill*), yaitu sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

1) Anggota Sat Intelkam Polres Bandung memiliki ketrampilan dalam melakukan penyelidikan, pengamatan dan penggalangan.

2) Memiliki ketrampilan dalam menganalisa/menilai potensi konflik yang harus dicegah.

3) Memiliki ketrampilan dalam membuat laporan intelijen yang berkualitas.

c. Dari segi sikap (*attitude*), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar dan minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan nilai serta (*value*), yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.

1) Memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan tugas tidak maksimal.

2) Mempunyai motivasi dan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk pelaksanaan tugas tugas Intelijen.

3) Tidak ada perilaku yang menyimpang dari anggota Sat Intelkam Polres Bandung.

Metode

Metode deteksi dini yang di harapkan, dikaji berdasarkan siklus operasional intelijen yaitu melihat urutan tindakan atau langkah yang di tempuh oleh Sat Intelkam Polres Bandung dalam rangka kegiatan penyelidikan, pengamanan dan pengalangan, dimana langkah akhir kembali pada langkah awal darimana kegiatan intelijen di mulai. Siklus intelijen dalam melaksanakan deteksi dini, yakni perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian.

1. Perencanaan

Memiliki Rencana setiap hari dalam melakukan deteksi dini dengan adanya produk unsur utama keterangan (UUK) setiap hari yang berkaitan dengan deteksi dini untuk pencegahan konflik horizontal

Pengumpulan Bahan Keterangan (baket)

Pengumpulan baket tentang deteksi dini pencegahan konflik horizontal, yang dilaksanakan oleh Sat Intelkam Polres Bandung, sebagai berikut :

- a. Taktik dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan baket menggunakan taktik dan teknik terbuka dan tertutup.
- b. Pengumpulan baket melalui penyelidikan yang berdasarkan berdasarkan UUK.
- c. Pengumpulan baket di lakukan melalui penyelidikan sendiri oleh anggota Sat Intelkam.

3. Pengolahan baket

Pengolahan baket konflik horizontal dilakukan dengan menghubungkan kejadian lain yang berkaitan, dan faktor yang berpengaruh. Sehingga pengolahan yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polres Bandung tajam dan komprehensif..

4. Penyajian baket

Penyajian baket tepat waktu, ketepatan kepada siapa produk diberikan, dan tepat jenis produknya.

C. Kontribusi

Kondisi ideal tersebut di atas menunjukkan bahwa Polres Bandung mampu mengoptimalkan Sat Intelkam dalam deteksi dini sehingga memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Tingginya kompetensi SDM Sat Intelkam Polres Bandung baik aspek kuantitas, pengetahuan, kemampuan maupun keahlian yang dikuasai individu dalam mencegah konflik horizontal.
2. Pelaksanaan metode deteksi dini guna mencegah konflik horizontal berjalan maksimal sehingga pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan sebagai wujud deteksi dini, pencegahan dan deteksi aksi mengacu kepada ketentuan yang sesuai.

Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dan pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsifungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuantujuan masa datang⁷.

⁷Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara. 1996

A. Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya harkamtibmas melalui peran sat Intelkam terhadap deteksi dini guna mencegah konflik horizontal antar umat beragama.

Misi: Adalah suatu upaya yang harus dijabarkan untuk mencapai visi. Misi Polres Bandung untuk mengoptimalkan Peran Sat Intelkam terhadap deteksi dini guna mencegah konflik horizontal antar umat beragama dalam rangka mewujudkan harkamtibmas, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia Sat Intelkam Polres Bandung yang mendukung deteksi dini dalam mencegah konflik horizontal.
2. Meningkatkan metode yang mendukung deteksi dini dalam mencegah konflik horizontal.

B. Tujuan

1. Terbentuknya kemampuan sumber daya manusia Sat Intelkam Polres Bandung dalam melakukan deteksi dini guna mencegah konflik horizontal.
2. Tersusunnya metode yang mendukung deteksi dini dalam mencegah konflik horizontal.

C. Sasaran

1. Guna terbentuknya kemampuan sumber daya manusia Sat Intelkam Polres Bandung terhadap deteksi dini guna mencegah konflik horizontal, maka sasaran yang hendak di capai adalah :
 - a. Melakukan pendidikan dan latihan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku anggota.
 - b. Memberikan reward dan punishment kepada anggota yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan.
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta analisa dan evaluasi

terhadap program pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan dan pelaksanaan agar tidak ada penyimpangan.

2. Guna tersusunnya metode yang mendukung deteksi dini guna mencegah konflik horizontal. Sasaran yang hendak di capai adalah:
 - a. Meningkatkan pembentukan jaringan informasi di masyarakat.
 - b. Meningkatkan pembinaan jaringan informasi.
 - c. Menerapkan fungsi manajemen di setiap tindakan dan tahapan dalam melakukan deteksi dini.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan Fokominda dalam deteksi dini terhadap potensi konflik horizontal.
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta analisa dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan dilaksanakan agar tidak ada penyimpangan.

A. Kebijakan

1. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan anggota dalam melakukan penanganan konflik horizontal.
2. Meningkatkan kerjasama dengan Kominda dalam deteksi dini dan peringatan dini.
3. Menerapkan fungsi manajemen dalam deteksi dini guna mencegah konflik horizontal yang dilakukan Polres Bandung dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

B. Strategi

Menurut wikipedia, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah

aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya Siagian (2004) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.

Menentukan strategi dalam mengambil langkah efektif, maka disusun suatu rumusan mengacu kepada analisis SWOT dengan menggabungkan keseluruhan faktor faktor yang mempengaruhi, maka strategi yang dapat dipilih untuk ditindak lanjuti adalah:

1. Strategi Jangka Pendek
 - a. Antisipasi dampak kebijakan pasca konflik
 - b. Melakukan Pemetaan potensi konflik.
2. Strategi Jangka Sedang
 - a. Melaksanakan Wasdal dan Anev
 - b. Membentuk jaringan informasi di wilayah berppotensi konflik sebagai basis deteksi dini.
3. Strategi Jangka Panjang
 - a. Meningkatkan Program Sinergitas Polisional Center (SPC)
 - b. Memberikan Reward & Punishment

F. Implementasi Strategi (*action plan*)

1. Strategi Jangka Pendek (0-6 Bulan)
 - a. Antisipasi dampak pasca konflik
Menyikapi situasi wilayah konflik sering dimanfaatkan oknumoknum aparat pemerintah daerah, aparat keamanan ataupun relawan untuk mengambil keuntungan ditengah kekeruhan dengan jalan pintas atau menyimpang mencari keuntungan diri. Maka Kabag Ops bersama Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Binmas dan Kasat Sabhara serta Kapolsek jajaran untuk melaksanakan upaya

pemeliharaan situasi damai padamasa pasca konflik antara lain:

- 1) Mengantisipasi penyimpangan penyaluran dan bantuan dari pemerintahan dan relawan dengan mengadministrasikan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab.
- 2) Monitoring data kerusakan/ kerugian agar tidak terjadi *mark-up* untuk tujuan korupsi.
- 3) Mengawas penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak ada diskriminasi.

1) Mengantisipasi terjadinya KKN antara petugas dengan kelompok korban fiktif.

b. Melakukan Pemetaan daerah potensi konflik

2) Wakapolres, kabagOps dan kasat Intel melakukan pemetaan daerah potensi konflik sosial di wilayah Polres Bandung

3) Kasat Intel dan jajaran yang telah ditunjuk melakukan pemetaan potensi konflik di wilayahnya.

4) Wakapolres, Kabag Ops dan kasat intel mengawasi dan mengendalikan pemetaan konflik yang dilakukan anggota Sat Intelkam serta melaporkan hasil pemetaan kepada Kapolres .

5) Wakapolres menganalisa hasil pemetaan dan melaporkan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

2. Strategi Jangka Sedang (0-12 Bulan)

a. Melaksanakan Wasdal dan Anev

1) Wakapolres, Kabag Ops, Kabag Sunda dan Kasat Intel melakukan

- pengawasan dan pengendalian serta analisa dan evaluasi terhadap program yang telah di laksanakan.
- 2) Wakapolres melaporkan hasil wasdal dan anev kepada pimpinan.
- b. Membentuk jaringan informasi di wilayah berpotensi konflik sebagai basis deteksi dini
- 1) Wakapolres, Kabag ops dan Kasat Intel membuat perencanaan untuk membentuk dan membina jaringan intelijen di wilayah Polres Bandung.
 - 2) Kasat intel dan jajaran yang telah ditunjuk melaksanakan pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen di wilayah berpotensi konflik sebagai basis deteksi dini untuk mencegah timbulnya konflik horizontal di masyarakat.
 - 3) Wakapolres, Kabag Ops dan kasat Intel mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pembentukan dan pembinaan jaringan yang dilakukan oleh anggota Sat Intelkam serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

3.Strategi Jangka Panjang (0-24 Bulan)

- a) Meningkatkan Program Sinergitas Polisional Center (SPC)
- 1) Wakapolres bersama Kasat Binmas dan Kapolsek jajaran untuk melakukan internalisasi program Sinergitas Polisional Center (SPC) kepada anggotanya sebagai upaya untuk mencegah konflik horizontal yang bernuansa SARA.
 - 2) Wakapolres membentuk Tim Kualiti Kontrol sebagai upaya menjalankan program Sinergitas Polisional Center (SPC) secara

berkelanjutan guna mencegah konflik horizontal yang bernuansa SARA.

3) Wakapolres memimpin Tim Kualiti Kontrol guna mencegah konflik horizontal yang bernuansa SARA.

b. Memberikan Reward & Punishment

1) Wakapolres, kabag Sumda, kasat Intel menyusun rencana untuk memberikan reward kepada anggota yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan punishment kepada anggota yang melanggar.

2) Kasat Intel dan Kasi Propam menilai anggota Sat Intelkam yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran untuk di ajukan kepada kabag sumda pemberian Reward dan Punishment.

3) Kapolres memberikan penghargaan terhadap personil Sat Intelkam yang berprestasi berupa uang pembinaan, piagam penghargaan serta memberi kesempatan seluas luasnya kepada personil Sat Intelkam yang memenuhi syarat untuk mengikuti sekolah pengembangan alih golongan secara prioritas dan bagi personil yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai.

Kesimpulan

1. Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, sesuai dengan permasalahan dan Persoalan serta kondisi saat ini, penulis menyimpulkan bahwa saat ini pelaksanaan deteksi dini oleh Polres Bandung guna mencegah konflik horizontal belum optimal, hal ini di sebabkan karena sumberdaya manusia Sat Intelkam Polres Bandung dan metode yang di gunakan kurang mendukung.

sehingga kondisi ini berimplikasi terjadinya konflik horizontal tidak bisa di cegah dan harkamtibmas tidak terwujud. Upaya yang dilakukan Polres Bandung adalah memenuhi jumlah personil Sat Intelkam dan meningkatkan kualitasnya melalui pelatihan kualitasnya melalui pelatihan pelatihan serta memberikan kesempatan dikjur intelijen.

2. Metode yang dilakukan personil Sat Intelkam Polres Bandung terhadap deteksi dini dirasakan belum maksimal, dikarenakan faktor internal dari personil tersebut sehingga Polres Bandung perlu melakukan suatu upaya terobosan kreatif dalam metode deteksi dini melalui pelibatan tokoh adat dan masyarakat guna mencegah konflik horizontal antar umat beragama sehingga harkamtibmas dapat terwujud.

B. Rekomendasi

1. Mengusulkan kepada Kapolda Bandung UP. Dir Intelkam Polda Jabar selaku pembina fungsi teknis Intelijen untuk memberikan pelatihan peningkatan kemampuan kepada anggota yang melaksanakan deteksi dini serta untuk memberikan supervisi dan asistensi terhadap deteksi dini yang telah dilakukan oleh Polres Bandung guna mencegah konflik horizontal.

2. Mengusulkan kepada Kapolda Bandung UP. Karo OpsPolda Jabar untuk membuat rapat koordinasi skala daerah dengan mengundang seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama dan

MUI daerah untuk membahas permasalahan konflik aliran agama tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambar Teguh, Sulistiani. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.2009
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 705.1996
- Ismail.C.Makalah Jendral (Prn)“Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi” disampaikan pada Seminar Sekolah STIK Jakarta.
- Rangkuty Freddy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, IkrarMandiriabadi.2009
- Sri WahyudiAgustinus. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara.1996
- Pierce, John A dan Richard B Robinson. *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- P.J, Hildreth& Kimble, C. “*The Duality of Knowledge*” *Information Research*, 8 (1), paper no. 142.2002
- George Terry R. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal 9, 10.1992

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 1 angka 5.

Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang OTK Polres dan Polsek